

Kyai Hardawalika: Mistisisme Jawa Mataram dan Kemelut Suksesi Takhta Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921)

Moh. Taufiqul Hakim

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said, Indonesia
Korespondensi: sajjanacarita@gmail.com

Abstract

*This research examined the manuscript of *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* recording the coronation ceremony of Pangeran Juminah as crown prince on 11 November 1895. The event took place during the era of Sultan Hamengku Buwana VII (reigned 1877-1921), which was full of political pressure from the Dutch and political intrigues of court relatives who wanted to take over the Sultan's throne. The manuscript is written in Javanese script. The manuscript in macapat is the collection of a Dutch scholar and missionary Ir. J.L. Moens (1887-1954) which is now stored at the National Library of Indonesia with the number KBG 921. This research highlighted the absence of the Kangjeng Kyai Hardawalika heirloom in the coronation procession. In fact, in the tradition of the Islamic Mataram kingdom, it is a mystical allegory of the power that sustained the reign of the ruling king. Through philological reading, it was found that the absence of Kyai Hardawalika was a mystical-symbolic acknowledgement by a king who obeys and upholds tradition, namely Sultan Hamengku Buwana VII, of the current socio-political conditions. The absence of Kyai Hardawalika showed that the reigning king at that time no longer had the power to support the government. This is because the Sultanate of Yogyakarta was founded on colonial political contracts that were detrimental to the kingdom and the Javanese people in general.*

Keywords: *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*, Sultan Hamengku Buwana VII, Ampilan Dalem, Kyai Hardawalika, Javanese Mysticism

Abstrak

Penelitian ini mengkaji naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* yang mencatat prosesi upacara penobatan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota pada 11 November 1895. Peristiwa tersebut terjadi di era Sultan Hamengku Buwana VII (bertakhta 1877-1921), yang penuh dengan tekanan politik dari Belanda dan intrik politik kerabat istana yang ingin mengambil alih takhta Sultan. Naskah ini ditulis dengan aksara dan berbahasa Jawa. Naskah bermetrum macapat ini merupakan koleksi seorang cendekiawan dan misionaris Belanda Ir. J.L. Moens (1887-1954) yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan nomor KBG 921. Penelitian ini menyoroti absennya pusaka Kangjeng Kyai Hardawalika dalam prosesi penobatan. Padahal, dalam tradisi kerajaan Mataram Islam, ia merupakan alegori mistis dari kekuatan yang menopang pemerintahan raja yang berkuasa. Melalui pembacaan filologis, ditemukan bahwa absennya Kyai Hardawalika merupakan sebuah pengakuan secara mistik-simbolis oleh seorang raja yang taat dan teguh memegang tradisi, yakni Sultan Hamengku Buwana VII terhadap kondisi sosial-politik yang sedang terjadi. Absennya Kyai Hardawalika menunjukkan bahwa raja yang bertakhta saat itu sudah tidak mempunyai kekuatan sebagai penopang jalannya pemerintahan. Pasalnya, Kesultanan Yogyakarta berdiri di atas kontrak-kontrak politik kolonial yang merugikan kerajaan dan orang Jawa pada umumnya.

Kata Kunci: *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*, Sultan Hamengku Buwana VII, Ampilan Dalem, Kyai Hardawalika, Mistisisme Jawa

PENDAHULUAN

Sukses takhta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII berjalan terjal. Intrik politik kolonial Belanda dan peristiwa-peristiwa tak terduga dialami pihak Istana (Sesana, 2010; Apriyadi & Buduroh, 2022). Sebanyak tiga putera mahkota silih berganti telah dinobatkan, namun mereka tak pernah sampai menduduki takhta kesultanan. Putera mahkota pertama, GRM. Akhadiyat jatuh sakit dan meninggal dunia. GRM. Pratistha alias Adipati Juminah yang menggantikannya, dicabut gelarnya karena alasan kesehatan. Begitu juga putera mahkota ketiga yang menggantikannya, GRM. Putro meninggal dunia karena sakit keras. Akhirnya diangkatlah GPH. Puruboyo yang kelak duduk di singgasana takhta bergelar Sultan Hamengku Buwana VIII.

Upacara penobatan putera mahkota GRM. Pratistha alias Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Juminah berlangsung pada Senin Kliwon, 23 Jumadilawal Wawu 1825/ 11 November 1895. Dokumen yang mencatat prosesi upacara tersebut adalah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*. Naskah beraksara dan berbahasa Jawa dengan metrum macapat ini merupakan koleksi seorang cendekiawan dan misionaris Belanda Ir. J.L. Moens (1887-1954). Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan nomor KBG 921. Naskah ini menggambarkan prosesi upacara penobatan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota, antara lain pusaka-pusaka *Kangjeng Kyai Upacara*, jajaran pejabat istana maupun residen Belanda yang hadir, hingga jalannya prosesi.

Akan tetapi, ada yang janggal dalam prosesi tersebut. Lazimnya, dalam upacara penobatan maupun jumenengan, Kangjeng Kyai Upacara terdiri dari Banyak, Dalang, Sawung, Galing, Hardawalika, Kacu Mas, Kutuk, Kandhil dan Saput. *Kangjeng Kyai Upacara*, atau kadang disebut *Ampilan Dalem* atau *Ampilan Keprabon* yang terbuat dari emas itu menyertai kehadiran raja (*miyos*) dalam prosesi upacara. *Ampilan* secara khusus dibawakan oleh abdi dalem manggung yang terdiri dari para gadis kerabat raja. Tetapi, dalam *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*, *Ampilan* Kyai Hardawalika tidak disertakan dalam prosesi upacara. Padahal, Kyai Hardawalika dan delapan *Ampilan* lainnya selalu menyertai raja ketika menghadiri upacara. Sembilan pusaka tersebut sejak era Sultan Hamengku Buwana I merupakan simbolisasi mistik Jawa Mataram yang berkaitan dengan aspek batin arsitektur keraton, sekaligus menunjukkan kewibawaan, simbol pelindung, sikap adil dan bijaksana raja terhadap rakyatnya (bandingkan Setiyanto, 2010: 22).

Penelitian ini hendak menjelaskan keberadaan *Kangjeng Kyai Upacara* dalam penobatan GPH. Pratistha alias Pangeran Juminah sebagai putra mahkota. Peristiwa ini secara khusus tercatat dalam naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*. Bagaimanapun, upacara penobatan putra mahkota merupakan sebuah peristiwa penting dan sakral kerajaan. Sakralitas upacara ini antara lain terletak pada dimensi mistisisme Jawa Mataram yang disimbolkan dalam *Kangjeng Kyai Upacara*. Persoalan yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana mistisisme Jawa turut mengkonstruksi eksistensi Kraton Mataram dan bagaimana hubungannya dengan tidak disertakannya *Kangjeng Kyai Upacara* Kyai Hardawalika pada saat penobatan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota Sultan Hamengku Buwana VII.

Berkaitan dengan tinjauan kepustakaan, beberapa penelitian terdahulu mengenai upacara di lingkungan kraton antara lain pernah dilakukan oleh Siregar (2002). Penelitian ini membabar latar belakang adat perkawinan dan tata rias pengantin Kraton Yogyakarta sebagai upacara ritual kenegaraan. Penelitian ini juga menjelaskan konteks meluasnya upacara adat perkawinan dan tata rias pengantin Kraton Yogyakarta dari upacara ritual kenegaraan menjadi upacara populer.

Menurut penelitian tersebut, upacara-upacara perkawinan di Kraton Yogyakarta mengalami perubahan dari masa HB VII, HB VIII dan HB IX. Perubahan ini terlihat dari tata busana, urutan acara, tata rias pengantin, peralatan atau perlengkapan, sesaji, dan gamelan Kraton. Seiring berjalannya waktu, upacara perkawinan Kraton yang awalnya menjadi tradisi yang secara eksklusif milik Kraton menjadi milik masyarakat umum secara luas. Dari sinilah upacara perkawinan yang asalnya bersifat elitis kemudian menjadi bersifat populis.

Ketika upacara perkawinan Kraton Yogyakarta telah menjadi milik masyarakat umum di era HB IX, tampak terjadi pergeseran nilai-nilai. misalnya pada urutan acara, busana dan tata rias pengantin, peralatan dan perlengkapan pengantin, gamelan dan sesaji telah berbeda dan tidak dipergunakan seperti dahulu lagi. Akan tetapi, upacara ritual kenegaraan yaitu upacara adat yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma budaya khas Kraton Yogyakarta hanya boleh dilakukan oleh pihak Kraton, dan bukan oleh masyarakat umum, dengan sejumlah aturan tertentu.

Upacara-upacara dan tradisi-tradisi tersebut selain sebagai khazanah kebudayaan, secara spiritual maupun sosial juga untuk memperkuat kebesaran raja di mata rakyatnya. Menurut penelitian tersebut, demi mempertahankan kebesaran pemerintahannya, seorang raja memperagung tradisi yang ada. Tujuannya untuk menimbulkan kesan di benak masyarakat melalui busana dan keluarga raja disertai dengan rangkaian upacara yang rumit.

Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan mistisisme Jawa, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan Mataram dilakukan oleh Suyanto (2005). Penelitian ini menyatakan bahwa raja dalam konteks tradisi kerajaan Mataram dipandang sebagai pusat kosmis dan mistis. Sebab, ketika seseorang dinobatkan menjadi raja, ia bukan semata-mata karena keturunan raja melainkan karena ia diyakini mendapatkan wahyu atau *wangsit* dari Yang Maha Kuasa.

Wahyu yang menjadi penentu bagi seseorang untuk menjadi raja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang penguasa, karena melalui wahyu itulah seorang penguasa mendapatkan legitimasinya. Tanpa wahyu, kekuasaan seorang raja dianggap tidak berarti sama sekali. Penguasa atau para raja Jawa percaya bahwa tugas yang mereka emban adalah menciptakan keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan antara dunia mikrokosmos dan makrokosmos. Pelaksanaan tugas ini akan sempurna hanya jika penguasa memperoleh wahyu. Raja dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual bagi seluruh kekuasaan dan otoritasnya. Pasaunya, hanya rajalah yang dipercayai mampu menyerap kekuatan-kekuatan kosmis dari alam sekelilingnya.

Dari seluruh tinjauan pustaka tersebut belum ada kajian mengenai mistisisme Jawa Mataram yang terkait dengan *Kangjeng Kyai Upacara*, khususnya yang berkaitan dengan penobatan putra mahkota. Penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai ritual upacara di lingkungan Kraton Yogyakarta dan kaitannya dengan mistisisme Jawa Mataram. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan *Ampilan Dalem* Kangjeng Kyai Upacara dalam konteks upacara penobatan putera mahkota yang sakral, serta absennya Kyai Hardawalika dan keterkaitannya dengan kondisi sosial politik yang meliputi Kraton Yogyakarta kala itu.

Selanjutnya adalah tentang teori dan pendekatan dari artikel ini. Orang Jawa, terutama masyarakat Kraton Mataram, sekalipun mereka telah memeluk agama Islam, hingga kini secara religius masih menaruh kepercayaan akan adanya benda-benda keramat yang bertuah. Benda-benda pusaka atau perkakas untuk acara tertentu yang disebut dengan *ampilan*, keris, tombak, pedang dan sebagainya dipercaya memiliki roh dan karena itu bisa memberikan pengaruh kepada dunia material. Pusaka-pusaka tersebut dipercaya mampu menghadirkan keamanan,

kewibawaan, penyembuhan dan sebagainya. Benda-benda yang dikeramatkan ini dalam pemikiran mistik Jawa Mataram diyakini mempunyai kuasa yang istimewa, seperti 'pengasihian' (mendatangkan kasih), 'kawiryan' (kemuliaan), dan 'kekebalan' dan sebagainya (Masroer, 2014: 106). Keyakinan mistik ini pula yang terdapat pada *Kangjeng Kyai Upacara* dan menyertai raja ketika dilangsungkan ritual upacara berlangsung.

Pendekatan yang digunakan di sini adalah filologi dengan mengacu pada teori filologi Pollock. Filologi menurut Pollock, dengan merujuk pada Nietzsche, adalah sebuah pembacaan yang pelan (*slow reading*). Maksudnya adalah membaca dalam kesadaran diri yang tinggi tentang apa sebenarnya yang kita lakukan saat membaca. Semakin dekat teksnya, semakin kecil kesadaran terhadap proses yang kita gunakan untuk memahaminya. Sebaliknya, semakin jauh jarak dengan teks, semakin sadar kita akan proses-proses tersebut (Pollock, 2014a: 400).

Jika dicermati pernyataan tersebut, muncullah sebuah pengertian atau pemahaman bahwa filologi bukan sekadar berurusan dengan teks, tetapi juga dengan dimensi ruang-waktu. Matrik ruang-waktu turut membentuk dan mempengaruhi praktik-praktik kita dalam memahami teks, bahwa 'jarak' bukanlah sesuatu yang tunggal namun bervariasi.

Dari pemahaman itu, Pollock kemudian menjelaskan bahwa ada tiga domain dalam filologi: waktu-tempat asal mula teks, pembaca terdahulu, dan sang 'aku' yang membaca di sini dan saat ini. Dari ketiga domain ini kemudian melahirkan tiga dimensi makna yang berpotensi sangat berbeda dalam filologi: pengarang, tradisi, dan sang 'aku' sendiri, dan tiga dimensi yang berpotensi berbeda terkait dengan kebenaran tekstual-historis, tradisi dan presentis (Pollock, 2014a: 401).

Banyak pemikiran mengenai teks-teks di Barat sejak Renaisans, kata Pollock, berkaitan dengan pembacaan historis. Namun pembacaan historis ini ternyata bertentangan dengan pembacaan presentis. Pertentangan antara kedua cara ini ditemukan dalam setiap jenis apropriasi tekstual, baik sastra, agama, hukum atau filsafat. Hal ini tetap menjadi sumber perselisihan yang terus berlanjut, mulai dari literalisme teologis hingga orisinalisme konstitusional.

Pemahaman historis berkenaan dengan ketegangan itu dikemukakan oleh Anthony Grafton. Kaum humanis Italia membedakan pembacaan historis dari pembacaan retorik atau alegoris. Pembacaan yang terakhir ini lebih berfungsi untuk memenuhi tujuan masa kini atau untuk menghasilkan apa yang disebut Grafton sebagai 'klasik ahistoris.' Sejumlah sarjana menggunakan kedua jenis penafsiran tersebut sesuai dengan keadaan yang ditentukan. Sebuah penjelasan teoritis telah ditawarkan dalam hermeneutika filosofis, yang menunjukkan, di tengah kemenangan historisisme, terdapat historisitas subyektivitas pembaca yang tidak dapat dilampaui (Pollock, 2014a: 402).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kerja kepustakaan dengan menjadikan bahan tekstual-skriptural sebagai obyek utama penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama mengumpulkan data primer dan sekunder, kemudian mengklasifikasikan atau mereduksinya, lalu menganalisisnya dan kemudian menuliskan dalam bentuk laporan penelitian. Naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* merupakan data primer, sementara teks-teks lain yang berhubungan dengan topik ini merupakan data sekunder.

Pembacaan terhadap teks *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* ini merupakan jenis pembacaan filologis. Sebagai bentuk jalan atau seni memahami teks, filologi mengarahkan dirinya

pada tiga hal secara simultan terkait dengan keberadaan teks: momen kelahiran teks, resepsi teks sepanjang waktu dan kehadiran teks pada subyektivitas sang filolog itu sendiri (Pollock, 2014a: 399).

Ketiga aspek tersebut berpijak pada tiga ciri yang khas. Pertama adalah obyek studi yang khas, yakni bahasa manusia. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai bahasa manusia yang dikonkretkan atau ditekstualisasikan dalam naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*. Penerjemahan dari bahasa Jawa bermetrum macapat ke dalam bahasa Indonesia ditempuh sebagai langkah awal. Ciri kedua adalah interpretasi teks yang mencakup asal-usul, penerimaannya, dan dihadapkan pada subjektivitas filolog sendiri (bandingkan Pollock, 2014b). Ciri yang ketiga adalah metode penelitian yang khas. Langkah-langkah yang dimaksud dalam ciri ketiga mencakup analisis gramatikal, teks-kritis, retorik dan historisnya (Pollock, 2015: 19). Ciri kedua dan ketiga ini ditempuh dengan mencermati teks *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* dengan mempertimbangkan konteks, historisitas dan kaitannya dengan tradisi upacara di lingkungan Kraton Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*

Penelitian Naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dengan nomor kode KBG 921. Naskah ini berjumlah 147 halaman, ditulis dengan aksara dan berbahasa Jawa. KBG merupakan tanda bagi koleksi yang didapat dari *Koninklijk Bataviaasch Genootschap* (Benhrend, 1998: xviii).

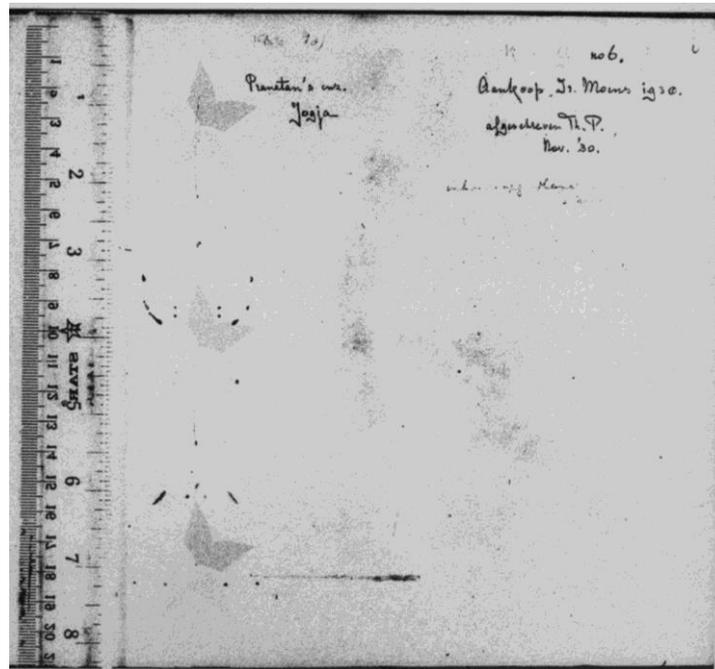
Naskah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil rekaman mikrofilm koleksi PNRI Rol. 76 No. 04. Menurut deskripsi yang terdapat pada halaman sampul mikrofilm, naskah KBG 921 mulanya dikoleksi oleh Ir. J.L. Moens di Yogyakarta (KBG Moens no. 6). Keterangan selanjutnya, naskah ini berisi aneka ragam teks *pranatan* tentang cara hidup di Kraton Yogyakarta sekitar tahun 1920 an, termasuk tentang nama jabatan para abdi dalem Kraton.¹ Naskah terdiri dari dua bagian. Halaman 1-92 merupakan tulisan tangan dengan pensil dalam buku tulis ukuran octavo. Bagian tersebut ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa.

Sebagaimana judulnya, *Pranatan* adalah peraturan atau tatanan yang sudah ditetapkan (Poerwadarminta, 1939: 75). Dalam khasanah pernaskahan Nusantara, naskah *Pranatan* biasanya memuat antara lain perihal tatanan upacara tertentu seperti kenaikan takhta, grebeg, labuhan, maupun pernikahan. Namun secara paleografis, judul *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* adalah tambahan baru dari *Koninklijk Bataviaasch Genootschap* yang mengoleksi naskah ini pada 1930. Judul tersebut ditulis pada bagian halaman depan naskah di bagian pojok kanan atas, secara utuh tertulis dalam bahasa Belanda sebagai berikut.

No. 6
Aankoop, Ir. Moens 1930
Algeschreven Th. P.
Nov. '30
inhouds M Mandasastra
+ woorden

¹ Deskripsi ini agaknya hanya mengacu pada halaman-halaman cetak yang memuat teks aksara Jawa dan teks huruf latin berbahasa Belanda pada halaman 94-147. Sedangkan halaman 1-93 sebenarnya berisi teks yang menceritakan peristiwa budaya di lingkungan Kraton Yogyakarta pada taun 1895. Lebih lanjut akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa naskah KBG 921 ini mulanya dibeli oleh Moens pada 1930. Kemudian ia memberinya kode No. 6. Dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land-En Volkenkunde Deel LXXI* (1931), laporan pembelian naskah-naskah Jawa yang dibuat atas nama *Koninklijk Bataviaasch Genootschap* oleh Ir. J. L. Moens di Yogyakarta dan Dr. Th. G. Th. Pigeaud di Solo pada 1929 dan 1930. Dijelaskan bahwa naskah-naskah dengan keterangan "Aankoop Ir. Moens 1930" semuanya berasal dari Yogyakarta (Moens, J.L. & Pigeaud, Th., 1931: 316-317).



Tangkapan layar sampul Pranatan Yogyakarta Hadiningrat rekaman mikrofilm koleksi PNRI.

Naskah-naskah yang ada dalam laporan tersebut secara umum dibeli melalui perantara maupun beberapa mata rantai perantara, sehingga cukup sulit diketahui pemilik asli kecuali terdapat keterangan di dalam naskah yang menunjukkan informasi tersebut. Selain itu, naskah-naskah yang dibeli umumnya ditulis oleh seorang penulis profesional atau carik. Karakter penulisan kesusastraan Jawa yang mendudukan sebuah karya sebagai karya bersama dan secara bebas dibenarkan untuk terus-menerus dilakukan penyalinan dan menambahkan bagian-bagian tertentu juga berpengaruh pada semakin kaburnya identitas penulis asli. Adapun pertimbangan Moens membeli naskah-naskah tersebut, termasuk naskah No. 6/ KBG 921 lantaran pada zaman itu ia menganggap naskah yang bersangkutan terancam bahaya kepunahan atau dilenyapkan karena pengaruh zaman modern. Secara ringkas, laporan tersebut menjelaskan bahwa KBG 921 berisi sejumlah naskah yang dikumpulkan di bawah bimbingan seorang ahli yang berkaitan dengan tata krama dan adat istiadat, busana pesta, presentasi dan gelar bangsawan tertinggi di Kesultanan Yogyakarta (Moens, J.L. & Pigeaud, Th., 1931: 318-323). Dihat dari konten tersebut, dalam hal ini, Moens hanya mengumpulkan tanpa melakukan intervensi sebagaimana yang ia lakukan pada naskah jenis lain yang ia kumpulkan, seperti cerita wayang, dongeng dan cerita-cerita mistis lainnya (Rahmawati, 2019: 13-14).

Belum jelas siapakah ahli yang dimaksud dalam penjelasan tersebut. Namun pada baris terakhir pada keterangan di halaman depan, tertulis nama M Mandrasastra sebagai sosok yang menyusun bundel dan isinya. Mas Mandrasastra adalah abdi dalem carik Punakawan Palawija

Bagusan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di era Sultan Hamengku Buwana VII (*Sêrat Pananggalan Inggang Kaping 27*, 1911: 345).

Jika dilihat dari urutan peristiwa, ubarampe, pihak-pihak yang terlibat, serta detilnya rangkaian acara penobatan putra mahkota yang diakhiri dengan pisowanan dan jamuan pesta, menjadi wajar karena sebagai abdi dalem Palawijan Bagus, Mas Mandrasastra terlibat langsung dalam rangkaian upacara *jumenengan* yang kemudian ia tulis. Di Kraton Yogyakarta, abdi dalem palawija, yakni sekumpulan orang yang mempunyai ciri fisik yang aneh seperti cebol, kerdil, bulai, yang bertangan tidak normal dipelihara sebagai jimat. Orang-orang dengan bentuk tubuh tertentu dipercaya menjadi sumber kekuatan gaib bagi orang lain. Dalam upacara tertentu di lingkungan Kraton, mereka beserta benda-benda *Ampilan Dalem* merupakan simbol kekuatan yang dipercaya dapat menguasai dan mengalahkan semua makhluk halus dari yang besar sampai yang terkecil, alias "ambawahaken kutu-kutu walang ataga" (Suwondo dkk, 1977: 140-141).

Naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* pada halaman 1-34 berisi rangkaian *jumenengan* Pangeran Juminah sebagai putra mahkota. Upacara tersebut berlangsung pada Senin Kliwon, 23 Jumadilawal Wawu 1825/ 11 November 1895 dengan sengkalan *Tata Panembahipun Angesti Sri Narapati*. Teks ditulis menggunakan metrum Dandanggula sebanyak 25 bait pada halaman 1-18. Pada halaman 18-34 ditulis dengan metrum Sinom, sebanyak 33 bait. Halaman selanjutnya berisi *tedhakan* atau salinan rangkaian kirab Dalem dan pakurmatan dansa yang digelar pada Sabtu Kliwon, 28 Jumadilawal 1825 (16 November 1895). Selanjutnya, halaman 37-50 berisi pranatan arak-arakan putra mahkota Pangeran Juminah yang digelar pada 28 Jumadilawal 1825/ 16 November 1895); halaman 51-55 berisi pranatan kirab Dalem, tata cara abdi dalem *caos tugur* kemudian perihal sowan kepada Sri Sultan; halaman 55-57 pranatan mengenai pasowanan putra dalem GPH Puruboyo, berlangsung pada Senin Kliwon, 23 Jumadilawal 1825/ 11 November 1895; halaman 57-58 catatan perihal setelah rangkaian arak-arakan sebelumnya, berlangsung pada Sabtu Kliwon, 28 Jumadilawal 1825/ 16 November 1895. Sri Sultan menuju Bangsal Kencana untuk mengucapkan terima kasih dan mengadakan pisowanan di Srimanganti; halaman 59-64 perihal tata cara arak-arakan putra mahkota; halaman 65-70 berisi pranatan jamuan makan dan dansa pada Sabtu Wage, 13 Jumadilakhir 1825/ 30 November 1895; halaman 73-79 berisi daftar busana yang digunakan putra dalem yang bergelar Gusti Kangjeng Ratu sehari-hari, ketika berada di dalam rumah, busana keprabon, busana tidur, juga tentang pemberian untuk abdi dalem edan-edanan perempuan maupun laki-laki; halaman 79-85 berisi catatan busana putra/putri dalem dari garwa ampeyan sehari-hari, busana keprabon, di dalam istana, busana tidur, abdi dalem edan-edanan putra/putri; halaman 86-87 catatan mengenai busana pangeran yang hendak menikah; halaman 88-92 catatan mengenai busana untuk menantu putri dan menantu putra.

Pada halaman 94-117 merupakan nukilan buku cetak yang dijilid menjadi satu dengan bagian depan. Bagian ini pada 8 lembar pertama merupakan nukilan berjudul *Rijksblad van Djokjakarta* tahun 1927 nomor 19 yang dikeluarkan pada Mei 1927, ditulis dengan huruf latin dan berbahasa Belanda. Halaman selanjutnya merupakan nukilan buku cetak beraksara Jawa yang isinya sama dengan versi latin pada lembar-lembar sebelumnya yakni catatan seputar gelar, pangkat, serta tata berbusana di lingkungan Kraton pada masa Sultan Hamengku Buwana VIII. Sementara halaman 118-147 adalah duplikat dari halaman 94-117. Semua nukilan-nukilan itu dijilid menjadi satu dengan bagian depan. Tulisan naskah pada umumnya jelas terbaca, memakai tinta hitam. Namun kertas naskah sudah nampak kotor. Kulit luar naskah berwarna kehitaman.

Fakta tekstual tersebut sekaligus mengoreksi deskripsi Behrend (1998: 257) bahwa naskah ini disalin pada 1920-an dari buku cetak. Deskripsi itu pula yang nampaknya di kemudian hari dijadikan rujukan dalam deskripsi naskah versi mikrofilm PNRI. Dilihat dari informasi tekstual yang telah dijelaskan di muka, sebagian halaman awal (halaman 1-92) yang ditulis dengan aksara dan berbahasa Jawa dengan sebagian halaman akhir (halaman 94-147) yang berbentuk cetak, berisi dua hal yang berbeda. Sebagian yang pertama berisi catatan adat-istiadat dan *pranatan* upacara di era Sultan Hamengku Buwana VII, sedangkan sebagian yang kedua berisi *Riksblad* atau peraturan negara yang dikeluarkan pemerintah pada 1927 di era Sultan Hamengku Buwana VIII (bertakhta 1921-1939).

Belum diketahui secara pasti kapan naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* ditulis. Dari informasi yang terdapat dalam teks, naskah ini dikumpulkan oleh Moens pada 1930. Pada separuh kedua bundel naskah ini memuat *rijksblad* keluaran 1927. Hal ini menjelaskan bahwa separuh pertama bundel naskah ini yang ditulis dengan aksara dan berbahasa Jawa, ditulis dan dikumpulkan oleh M Mandrasastra pada atau sebelum tahun 1930. Selanjutnya, naskah-naskah tersebut dikumpulkan menjadi satu bundel dan di kemudian hari dibeli oleh Moens. Dalam kurun 1930-1942, Moens mengumpulkan naskah dari dalang-dalang yang berasal dari desa-desa seperti di Godean, Gunungkidul, Kulon Progo dan lainnya. Koleksi tersebut kini tersimpan di PNRI (85 naskah), Perpustakaan FSUI (10 naskah) dan Perpustakaan Universitas Leiden (158 naskah) (Rahmawati, 2019: 4).

Alasan tekstual lain yang menguatkan dugaan bahwa naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* ditulis setelah peristiwa penobatan terjadi terdapat pada bait pertama. Dalam bait pertama Pupuh Dandanggula tertulis sebagai berikut.

Manising kang kinarya mêngëti/ tatkala karsa dalêm Nata/ ingkang Sinuhun Sultane/ kang jumênêng ping pitu...

Larik pertama pada awal bait tersebut menggunakan kata *mêngëti* yang berarti ‘mengingat’. Larik tersebut secara utuh memiliki arti ‘Sungguh indah ketika mengingat, ketika Sinuhun Sultan, yang berkuasa ketujuh..’ Artinya, naskah ini ditulis setelah peristiwa terjadi, sebagai catatan, sebagai pengingat sebuah peristiwa penting di Kraton Yogyakarta.

Pada halaman 1 hanya dijumpai parateks yang berbunyi *ngèngrèng rëgët mawi sëkar* yang artinya ‘rancangan dengan bentuk tembang’. Lazimnya, tradisi tulis istana, apalagi untuk menulis peristiwa yang dianggap penting diawali dengan menyusun rancangan. Supaya ketika seorang juru tulis atau pujangga tidak melakukan kesalahan ketika menulis naskah pada proses penulisan selanjutnya. Secara umum, teks rancangan dalam naskah ini juga dijumpai coretan-coretan di sana sini. Selain itu, pada akhir halaman 34, terdapat tulisan *Semaradana* alias nama metrum macapat. Namun pada baris berikutnya tidak terdapat bait lanjutan dari pupuh sebelumnya yang bermetrum Sinom. Boleh jadi proses penulisan berhenti karena suatu hal, atau sang juru tulis kala itu mengumpulkan sumber-sumber tertentu untuk melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses penulisan.

Halaman selanjutnya, pada awal halaman 37 terdapat parateks yang berbunyi sebagai berikut.

Buku tédhakan, nalika kirab dalêm. Ngarsa Dalêm, Sampeyan Dalêm Kangjêng Gusti. Kaping 28-7-'25. Utawi pakurmatan dhangsah, jumênêng Dalêm.

Artinya:

Buku salinan, mengenai kirab dalem. Ngarsa Dalem, Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti. Pada 28-7-1825. Atau pesta dansa, jumeneng Dalem.

Parateks ini memberikan informasi bahwa pada halaman yang dimaksud merupakan hasil salinan. Hanya saja belum diketahui rujukan Mas Mandrasastra dalam menulis salinan tersebut. Dilihat dari informasi tekstual yang ada, sang juru tulis nampaknya menyalin atau menulis catatan tersebut berdasarkan amatan terhadap rangkaian upacara yang kala itu ia terlibat secara langsung, catatan-catatan selama peristiwa berlangsung, atau barangkali ia menghimpunnya dari pihak lain yang terlibat dalam rangkaian peristiwa yang dimaksud. Berbeda dengan bagian sebelumnya yang ditulis dengan metrum Dandanggula dan Sinom, pada bagian ini ditulis dengan bentuk prosa.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa Mas Mandrasastra sedang merancang sebuah penulisan catatan sejarah yang terjadi pada 1825/ 1895 M, atau pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII, khususnya tentang jumenengan putra mahkota Pangeran Juminah. Hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai carik Punakawan Palawijan Bagus. Hasil karyanya tersebut kelak akan dibeli oleh Moens. Atau barangkali Moens sebelumnya memesan catatan upacara tersebut kepada Mas Mandrasastra, namun belum selesai.

Dengan demikian, terlepas dari tahun penulisan naskah yang masih samar, informasi tekstual di dalamnya cukup meyakinkan bahwa naskah ini merekam peristiwa yang benar-benar terjadi pada 1825/1895 M. Meskipun kesimpulan ini belum final lantaran sejauh ini belum ditemukan sumber pembanding atau sezaman yang disimpan di perpustakaan kraton yang mencatat *pranatan* upacara pada 1825/ 1895 M. Pasalnya, hanya naskah koleksi Moens inilah yang sejauh ini ditemukan dan mencatat rangkaian upacara penobatan putra mahkota Pangeran Juminah.

Ampilan Dalem dan Mistisisme Jawa Mataram

Salah satu unsur yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan Kraton Mataram Islam khususnya, dan masyarakat Jawa pada umumnya adalah mistisisme. Elemen mistik atau dimensi supranatural ini bahkan menjadi salah satu pilar penting bagi tegaknya Kraton dan kekuasaan di Jawa, baik dulu maupun sekarang. Mistisisme yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan Kraton ini kental dengan nuansa kejawaan dan karena itu banyak peneliti menyebutnya sebagai mistisisme Jawa, meskipun Mataram dikenal sebagai kerajaan yang bercorak keislaman.

Bagi masyarakat Jawa, apa yang disebut dengan yang *mistis* adalah yang terkait dengan transendensi Tuhan. Hal ini dimengerti sebagai *Tan kênâ kinaya ngapa* yang artinya: Tuhan adalah yang tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan segala sesuatu. Istilah *Tan kênâ kinaya ngapa* dalam Islam berbunyi *Laisa kamitslihi syai'un* yang artinya Tuhan tidak seperti apapun. Di samping dimensi transenden, Tuhan juga memiliki dimensi imanen. Dalam konteks budaya Jawa, dalam dimensi imanensinya, Tuhan disebut sebagai “Sing Momong” alias “Yang mengasuh atau yang merawat” (Widyatamanta, 1996: 105).

Sejak awal berdiri, Kerajaan Mataram Islam—yang sekarang terbagi menjadi empat: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran—tidak lepas dari mistisisme. Di dalam *Babad Tanah Jawi* misalnya dikisahkan bahwa ketika hendak membangun kerajaan Mataram, Panembahan Senopati (memerintah 1586-1601 M) tidak meninggalkan kepercayaan lama, yakni dengan bersemedi dahulu di pantai selatan dan bertemu dengan Ratu Pantai Selatan.

Dimensi mistik itu kemudian senantiasa menyertai sejarah perjalanan Kraton Mataram dari masa ke masa. Di era Sultan Agung (memerintah 1613-1646 M), nuansa mistik Jawa masih bertahan kuat meski Sultan Agung dikenal sebagai raja Mataram yang sangat intensif mengakomodir nilai-nilai keislaman di dalam tata kelola pemerintahannya. Sebagai bentuk upayanya mengangkat nilai-nilai dan spirit keislaman, Sultan Agung kemudian dikenal sebagai sosok raja yang mempertemukan atau mengkompromikan antara ajaran Islam dan budaya Jawa.

Akan tetapi, meski Sultan Agung berusaha mempertemukan atau memadukan antara Islam dan budaya Jawa, ia tidak lantas memutuskan hubungan mistisnya dengan penguasa rohani yang diyakini oleh masyarakat Jawa, Ratu Pantai Selatan. Bukan hanya itu, ia juga berziarah ke makam Sunan Bayat, seorang wali sekaligus bangsawan yang memperkenalkan Islam di wilayah Mataram Islam. Ketika berziarah, Sultan Agung ditemui oleh roh Sunan Bayat dan ia pun diajari ilmu-ilmu mistik rahasia olehnya. Dengan demikian, kekuasaan Bayat, terutama secara mistik-spiritual, terhubung dengan kerajaan Mataram (Ricklefs, 2013: 32).

Pandangan tersebut memiliki akar dan sejarah yang panjang. Di era pra-Islam, mistisisme Jawa tercermin dari tradisi masyarakat dalam mendewakan, mengkultuskan dan menyembah roh nenek moyang. Tradisi ini kemudian mendorong lahirnya hukum adat, kebudayaan dan relasi-relasi pendukungnya. Mistisisme ini pula yang mendorong munculnya ritual-ritual dalam masyarakat seperti *slamêtan* yang ditujukan untuk roh nenek moyang, yang menurut alam pemikiran mistik masyarakat Jawa dianggap sebagai dewa pelindung bagi keluarga yang masih hidup. Bahkan mistisisme atau nilai kepercayaan akan yang supranatural ini juga melahirkan karya-karya seni dalam masyarakat Jawa. Seni pertunjukan wayang dan gamelan misalnya konon juga difungsikan sebagai sarana keagamaan untuk mendatangkan roh nenek moyang. Fungsi dari roh nenek moyang adalah sebagai pamomong dan pelindung keluarga yang masih hidup. Agama asli yang oleh para pemikir Barat disebut *religion* magis ini merupakan nilai budaya yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa (Simuh, 1995).

Mistisisme dipahami sebagai kesadaran individu dalam penyerapan diri mereka terhadap substansi atau zat lebih tinggi yang hanya diperoleh melalui kepasrahan (Carus, 1908: 77-99), atau yang di dalam ajaran Islam Kraton Mataram dikenal dengan istilah *Manunggaling Kawula Gusti*. Dalam literasi-literasi Jawa masa lalu, mistisisme Jawa ini muncul sebagai paradigma. Banyak karya sastra Jawa mengungkapkan keunggulan dan kegemilangan dunia yang fana ini, namun pada akhirnya tetap kembali ke alam kesunyian. Seperti yang tertuang dalam *Sêrat Dewa Ruci*, *Sêrat Cabolèk*, dan sebagainya. Artinya, praktik mistisisme seperti kepercayaan terhadap daya magis roh nenek moyang, Ratu Kidul, maupun praktik-praktik kejawaan lainnya berada dalam ruang religius. Sementara secara teologis, tujuan dari semua itu adalah kepada Yang Maha Esa, *Kang Murbèng Dumadi* sebagaimana kepercayaan Islam.

Karena itu, berbicara soal mistik dalam konteks alam kebudayaan Jawa, sesungguhnya sangat terkait dengan eksistensi Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Mistik dalam konteks teologis ini bisa dikatakan sebagai sarana dan jalan bagi seseorang untuk membuka misteri pengetahuan keilahian sehingga mengantarkan seseorang pada kesadaran tentang Tuhan. Pengalaman mistik dalam budaya Jawa Mataram, yang berbasis pada ajaran *Manunggaling Kawula Gusti* ini dapat membawa individu pada perkembangan kepribadian menuju kedamaian batin dan stabilitas sosial. Tujuan puncak dari laku mistik ini, terutama yang berkaitan dengan situasi psikologis atau batin seseorang oleh Carl Jung dalam psikologi analitiknya disebut sebagai akhir perkembangan kepribadian manusia, sementara Abraham Maslow menyebutnya sebagai realisasi atau aktualisasi diri.

Kesadaran mistis yang telah mengakar kuat dalam alam pikiran masyarakat Jawa ini, secara historis kemudian sangat membantu kesiapan mereka dalam menerima kedatangan Islam melalui tasawuf (mistik) (Masroer, 2014: 21). Sebelum datangnya Islam, budaya Jawa termasuk dalam hal mistisisme banyak terpengaruh oleh agama Hindu-Budha. Setelah itu, Islam datang dengan tasawufnya dan mengenalkan Zat Tertinggi dan Maha Kuasa yang disebut dengan Allah. Selain mengakui Tuhan yang transenden dan imanen, dalam hal ini yang bernama Allah dianggap dan diyakini sebagai Tuhan yang personal, masyarakat Jawa juga mengenal-Nya sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dan adikodrati. Keyakinan seperti ini sudah ada dalam kesadaran masyarakat Jawa jauh sebelum Islam datang. Kedatangan Islam di Jawa hanya untuk memberikan legitimasi wahyu dan perubahan arah teologis dalam memahami dan menyikapi realitas mistik tersebut. Konsep mistik yang bercorak Islam ini pula yang banyak berpengaruh pada tradisi dan budaya kerajaan Mataram Islam. Istilah *Manunggaling Kawula-Gusti* yang sangat populer di Kraton Mataram bersumber dari tasawuf dalam Islam.

Meski mayoritas sudah beralih ke dalam Islam, mistisisme Jawa Mataram ini tidak bisa sepenuhnya lepas dari praktik mistisisme lama yang sudah hidup dan mengakar di dalam budaya masyarakat Jawa. Corak mistisisme yang dimaksud adalah mistisisme animisme dan dinamisme yang pernah berkembang di dalam masyarakat Jawa dengan keyakinan utamanya bertumpu pada roh. Realitas roh bagi masyarakat Jawa pra Islam diyakini ada di setiap entitas material. Pemahaman dan keyakinan ini kemudian membuat orang Jawa percaya bahwa benda-benda tertentu memiliki kuasa atau roh yang harus dihormati. Kepercayaan semacam ini berkembang dalam masyarakat hingga detik ini meski Islam telah berkembang dan menjadi dominan di Jawa. Lagi pula, kehadiran Islam yang disebarkan melalui tasawuf memang bukan bermaksud untuk menggusur total peradaban yang sudah ada di Jawa, termasuk peradaban mistik ini.

Dari keyakinan tersebut masyarakat Jawa percaya bahwa benda-benda sakral seperti keris, pohon besar, batu besar dan sebagainya dipandang memiliki penunggunya yang berupa roh. Segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti hutan, laut dan sungai dalam tradisi mistik Jawa, adalah sesuatu yang sakral atau keramat yang tidak boleh diperlakukan semena-mena, bahkan dijadikan sebagai sarana dalam prosesi ritual upacara.

Begitu juga dalam hal upacara ritual. Hingga kini benda-benda keramat dan bertuah turut menyertai jalannya prosesi upacara. Benda-benda pusaka atau perkakas untuk acara tertentu yang disebut dengan *Ampilan Kangjeng Kyai Upacara* atau kadang disebut *Ampilan Dalem* atau *Ampilan Keprabon* dipercaya memiliki roh dan karena itu bisa memberikan pengaruh kepada dunia material. Pusaka-pusaka tersebut dipercaya mampu menghadirkan keamanan, kewibawaan, penyembuhan dan sebagainya yang tercermin pada diri raja maupun para pemimpin pada umumnya. Benda-benda yang dikeramatkan ini dalam pemikiran mistik Jawa Mataram diyakini mempunyai kuasa yang istimewa, seperti 'pengasihian' (mendatangkan kasih), 'kawiryan' (kemuliaan), dan 'kekebalan' dan sebagainya (Masroer, 2014: 106).

Dalam tradisi Jawa, *Ampilan Dalem* yang turut menyertai prosesi upacara diketahui sudah ada sejak zaman pra Mataram. *Sêrat Bauwarna* anggitan Ki Padmasusastra mencatat, di era Kraton Medhangkamulan pada masa Prabu Sri Mahapanggung pada 1050 M *Ampilan* yang menyertai upacara keprabon kala itu adalah Cepuri, Rotan, Kendhaga, Kacu Mas, Kebut Lar Badhak satu set dan tameng. Di era Kraton Jenggala, Prabu Lembu Amiluhur pada 1117 M menyertakan beberapa *Ampilan* dalam upacara keprabon. *Ampilan* tersebut merupakan pemberian atau upeti dari negeri-negeri manca. *Ampilan* tersebut yaitu Ardawalika, pemberian dari raja Makassar; Kidang Kencana, pemberian dari raja Wandhan; Kuthuk Kencana, pemberian

dari raja Banjarmasin; Sawung dan Galing, pemberian dari raja Ngacih; Gajah Mas, pemberian dari raja Palembang; Banyak dan Dhalang, pemberian dari raja Siyam. Pemberian upeti berupa *Ampilan* tersebut juga menunjukkan bahwa raja Medhang kala itu membawahi kerajaan-kerajaan di mancanegara. Di era Jenggala, Prabu Panji Suryawisesa mempunyai dua *Ampilan*, yaitu Tombak Ambar Angin dan Tombak Pangawinan. Sementara itu, di era Mataram masa pemerintahan Sultan Agung pada 1566 M *Ampilan Dalem* yang digunakan adalah Tombak Ardacandra, Tombak Candrasa, Tombak Keracan, Tombak Trisula, Payung Kuning, Payung Bawat, Glodhong, dan seperangkat senapan (Padmasusastra, Jilid I, 1898: 76-77).

Kitab-kitab sastra yang ditulis dalam kurun abad 18-20 M, keberadaan *Ampilan Dalem* digambarkan menyertai kisah-kisah penobatan raja. *Sêrat Damarwulan* (MSS Jav 89), yang ditulis pada akhir abad ke-18 di luar istana, menceritakan kenaikan takhta Kusuma Kencanawungu sebagai raja Majapahit. *Ampilan Dalem* yang menyertainya yaitu Kacu Mas, Sawung, Galing, Kidang, Ardawalika, Senjata Jinggring, Bokor Kencana dan Kendhil (Pupuh 1, Bait 17). *Babad Pakualaman* (D Or. 15) yang menceritakan riwayat Kraton Kertasura dan ditulis pada 1800 M menggambarkan penobatan Pangeran Puger (bertakhta 17014-1719 M). Penobatan Pangeran Puger sebagai raja Kertasura dalam naskah tersebut dikisahkan disertai dengan *Ampilan Dalem* yaitu Banyak, Dhalang, Sawung, Galing, Kacu, Kidang Mas, Cepuri, dan Ardawalika (Pupuh 32, Bait 3).

Sêrat Panji Jayakusuma (Ms. or. quart. 2112) yang ditulis pada abad ke-19 M menggambarkan ketika Raja Bali, Prabu Jayalengkara *miyos* disertai dengan *Ampilan Dalem*. *Ampilan* tersebut terdiri dari Kidang Mas, Hardawalika, Kacu Mas, Sawung, Galing, Bakor Kencana dan Tadhahan (Pupuh 22, Bait 43-44). Salinan versi ini disinyalir ditulis di luar istana, berisi kisah perjalanan Kelana Jayakusuma, Prabu Ngurawan dan Prabu Daha yang hendak merebut Kerajaan Kediri. Di dalamnya juga dibalut kisah romantika Dewi Sekartaji yang mencari kekasihnya, Inu Kertapati. Kisah Panji Jayakusuma merupakan salah satu episode cerita klasik yang berkembang pada abad ke-11-14 M di masa akhir Hindu-Buddha di Jawa. Kisah ini hadir dalam konteks budaya lokal, berbeda dengan wiracarita Ramayana dan Mahabharata yang lebih kental bernuansa India (Zoetmulder, 1983: 534 dalam sastra.org).



Gambar 1. Tangkapan layar *Sêrat Panji Jayakusuma* halaman 63.

Ilustrasi Raja Bali, Prabu Jayalengkara sedang *miyos* disertai ampilan dalem. Dok.

<https://stabikat.de/Record/770268404>.

Keberadaan *Ampilan* juga digambarkan dalam naskah pedalangan. Diceritakan dalam *Pedhalangan Jangkep Lampahan Purbaningrat* karya Ki Slamet Soetarso (1967). Pada babak *Jejer ing Nagari Dwarawati*, Sri Bathara Kresna alias Sri Arimurti ketika *miyos* di istana disertai dengan *Ampilan Dalem*. *Ampilan* tersebut terdiri dari Banyak, Dhalang, Sawung, Galing, Hardawalika, dan Kacu Mas (Soetarso, 1967: 8). Struktur penggambaran ini agaknya mirip dengan penggambaran cerita Raja Mandraka ketika *miyos*, termasuk *Ampilan Dalem* yang menyertainya yang digambarkan dalam naskah pedalangan lain. Terutama penggambaran yang terdapat dalam *Pakemipun Ringgit Purwa* terbitan E.Y. Bril Leiden Jilid 2 halaman 4. Buku tersebut terbit pada 1884 dan merupakan nukilan dari pakem pedalangan tradisi Kraton Surakarta (Yayasan Sastra Lestari/ sastra.org).

Hadirnya *Ampilan Dalem* dalam tradisi penulisan sastra epos, serat/babad maupun pedalangan dalam kurun abad ke-18-20 menunjukkan bahwa kedudukannya penting bagi dunia batin orang Jawa. Hal ini tidak terbatas pada dunia di dalam istana, namun juga dalam tradisi penulisan sastra di luar istana. Mistisisme Jawa yang termanifestasikan dalam benda-benda tersebut menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya penting dalam upacara-upacara di lingkungan istana, namun juga penting dalam aspek puitika sastra Jawa lintas ruang dan waktu. Para pujangga memperkuat bangunan kesastraannya dengan alegori mistis dalam *Ampilan Dalem* guna menggambarkan karakter raja sebagai seorang pemimpin yang ideal, kuat dan berwibawa.

Di era Mataram Yogyakarta, *Ampilan Dalem* juga masih lestari sebagai salah satu elemen penting upacara kerajaan. Dalam upacara tertentu di lingkungan Kraton, benda-benda *Ampilan* yang terbuat dari emas tersebut merupakan simbol kekuatan yang dipercaya dapat menguasai dan mengalahkan semua makhluk halus dari yang besar sampai yang terkecil (Suwondo, dkk., 1976: 140-141). Benda-benda tersebut dibawa oleh sepuluh orang dara yang akan menghadap sultan, yang akan menggunakan benda-benda ini dalam upacara kerajaan (Hatmadji, dkk., 2014: 152-154). Benda-benda tersebut merupakan tanda kebesaran yang diyakini memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan citra ideal seorang penguasa agung.

Menurut Penghageng II Kawedanan Widyabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT. Rintaiswara, jumlah dan komposisi *Ampilan Dalem* dalam setiap upacara dan dari zaman ke zaman tidak tentu. Hal ini bergantung pada *dawuh* dari Sultan pada setiap upacara. *Ampilan Dalem* selalu disertakan setiap kali Sri Sultan *miyos* atau hadir dalam upacara Kraton, seperti *jumenengan*, grebeg Maulud, *daup* atau pernikahan, maupun *tingalan jumênêngan Dalêm* (KRT. Rintaiswara, Desember 2023).

Cukup sulit melacak jumlah dan komposisi *Ampilan Dalem* yang digunakan dalam upacara, terutama di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Jika dilihat pada arsip-arsip yang ada mengenai *pranatan* upacara, tidak seluruhnya mencatat kelengkapan *Ampilan Dalem*. Barangkali arsip-arsip yang khusus mencatat rangkaian prosesi upacara di lingkungan kraton lebih mementingkan tanggal kejadian upacara, urutan jalannya upacara, pihak-pihak yang terlibat, serta gambaran singkat berlangsungnya prosesi upacara yang harus dijalankan. Hal ini berdasarkan pembacaan dari arsip-arsip *pranatan* yang sejauh ini bisa dijangkau. Selain itu, menurut temuan yang ada, tradisi pencatatan prosesi upacara baru dimulai pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Hanya satu arsip *pranatan* yang sementara ini ditemukan pada era tersebut yakni *Pranatan Lampah-Lampah Karsa Dalêm Kagungan Damêl Mantu, 1847 AD/ 1917 M*. Namun di dalamnya tidak dijumpai deskripsi yang spesifik tentang *Ampilan Dalem*.

Beberapa arsip *Pranatan* yang menyertakan pencatatan *Ampilan Dalem* antara lain pada saat penobatan GRM. Dorojatun sebagai putra mahkota dan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwana IX pada 18 Maret 1940. Rangkaian acara penobatan dicatat dalam *Poenika Sêrat Pranatan Lampah-Lampah Djoemênêngakên Goesti Radèn Mas Dorodjatoen* koleksi Perpustakaan Widyabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun pada arsip tersebut *Ampilan Dalem* hanya disebutkan saja tanpa ada deskripsi yang lebih spesifik. Hal ini sebagaimana kutipan berikut.

Ampilan-Dalêm Kadipatèn mapan wontên Tratak Bangsal Kêntjono ingkang sisih lèr, dipoen ampil abdidalêm Kêparak Kadipatèn 3 idji, Manggoeng Kadipatèn (botên mawi tjoendoek sêkar) 1 idji. (EE 12. B. Hal. 2)

Artinya:

Ampilan Dalem Kadipaten diletakkan di Tratak Bangsal Kencana di sebelah utara, dibawakan oleh abdi dalem Keparak Kadipaten 3 buah, Manggung Kadipaten (tanpa mengenakan cunduk bunga) 1 buah.

Meskipun yang tercatat pada dokumen resmi kraton demikian, namun dokumentasi foto yang merekam upacara tersebut menunjukkan kenyataan lain. Dokumentasi foto penobatan Sri Sultan Hamengku Buwana IX merekam iring-iringan abdi dalem manggung yang membawa *Ampilan Dalem*. Ada sebanyak 8 abdi dalem yang membawa *Ampilan Dalem*. Mereka berjalan dua baris sembari membawa *Ampilan* masing-masing. Meskipun yang nampak jelas pada gambar hanya deretan depan, yakni Banyak, Dhalang, Sawung dan Galing, namun dokumentasi ini menunjukkan bahwa banyaknya *Ampilan* berbeda dengan yang dicatat dalam arsip *Pranatan*.



Gambar 2. Para wanita mengenakan perhiasan emas kerajaan pada pelantikan Hamengku Boewono IX sebagai sultan Jogjakakarta. Dok KITLV 54286.

Hal serupa juga terjadi saat pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwana X sebagai raja. Arsip yang mencatat rangkaian upacara hanya menyebut *Ampilan Dalem* dibawa oleh iring-iringan abdi dalem manggung. Namun tidak ada penjelasan lebih spesifik pada komposisi *Ampilan Dalem*. Hal ini sebagaimana tertulis dalam *Pranatan Lampah-Lampah Jumênêngipun Kangj[^]eng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum, 1989*, sebagai berikut.

Para Wayah darah-Dalêm manggung, ingkang kakêrsakake ngampil upacara-Dalêm sasampuna sumêkta sêdaya wèntên ing èmpèr Kagungan-Dalêm Bangsal Praboyêkso sisih wetan iring hêlèr, mêngangge kados mênawi ndèrèk Grêbêgan. (EE 43. Hal. 5)

Artinya:

Para cucu kerabat raja yang masih gadis, yang ditugaskan membawa perangkat upacara, semuanya bersiap di teras Bangsal Prabayeksa di sebelah timur-utara, busana yang dipakai seperti ketika mengikuti Grebeg.

Sementara itu, yang terekam dalam dokumentasi foto terdapat sembilan *Ampilan Dalem* yang dibawakan oleh abdi dalem manggung. Kesembilan *Ampilan Dalem* tersebut adalah 1). Banyak; 2). Dhalang; 3). Sawung; 4). Galing; 5). Hardawalika; 6). Kacu Mas; 7). Kutuk; 8). Kandhil; 9). Saput. Hal tersebut sebagaimana dokumentasi berikut ini.



Gambar 3. Penobatan Sri Sultan Hamengku Buwana X sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921). Dok Jogja Dwipa

Masing-masing pusaka itu memiliki makna atau pesan simbolis-mistis. Secara mistik-simbolis, pesan-pesan yang terkandung dalam kesembilan *Ampilan Dalem* tersebut adalah:

(1) *Banyak* atau angsa yang berarti lambang kesucian dan kewaspadaan. Angsa atau banyak dikenal sebagai binatang yang sangat tinggi tingkat kewaspadaannya. Hal ini memiliki makna bahwa seorang raja atau ratu, dalam melaksanakan pemerintahan harus selalu siap untuk mencegah berbagai bahaya yang mungkin dapat menyerang negara.

(2) *Dalang* atau kijang yang berarti tindakan cepat dalam membuat keputusan. Hewan ini terkenal cekatan dan lincah. Ini bermakna bahwa seorang raja atau ratu harus dapat bertindak cepat dalam membuat keputusan, dalam memerintah, dan juga dalam bersikap. Masalah seberat apa pun harus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, entah itu perkara kecil, apalagi perkara besar yang menyangkut negara.

(3) *Sawung* atau ayam jago yang berarti lambang keberanian dan ksatria. Jika menghadapi lawan, entah dari dalam atau luar negara, raja harus bertanggung jawab. Semua permasalahan harus diselesaikan secara jantan meski harus bersimbah darah, bahkan bertaruh nyawa. Dengan begitu, kewibawaan raja akan menular ke sentana (kerabat), prajurit, dan seluruh rakyat. Semua akan memunculkan kesamaan semangat, terus maju pantang mundur, walau hanya sejengkal.

(4) *Galing* atau burung merak melambangkan kewibawaan dan juga keindahan melalui bulu-bulunya. Ini artinya bahwa raja atau pemimpin di setiap kehadiran dan kesempatan selalu memunculkan keindahan. Bagai besi berani, selalu keluar daya tarik yang menjadikan siapa pun tak akan pernah puas menghadapnya. Bukan semata yang lahiriah, tapi juga karena kewibawaannya.

(5) *Hardawalika* yang berarti naga yang menopang atau kekuatan. Hal ini melambangkan tanggung jawab raja dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara. Ini artinya, dengan kekuatan yang dimiliki, seorang raja harus selalu bisa menangani dan mempertanggungjawabkan penyelesaian sebuah perkara. Jadi, bukannya melemparkan tanggung jawab pada orang lain, entah prajurit atau bawahannya, melainkan harus berani dan mampu mengatasi masalah dengan dirinya sendiri.

(6) *Kacu Mas* yang berarti sapu tangan melambangkan raja sebagai sapu tangan yang membersihkan semua kotoran. Jika ada kerabat, rakyat, atau siapa pun yang pernah melakukan kesalahan lalu meminta maaf seorang raja harus bersedia memberi ampunan. Kesalahan dimaafkan, diusap dengan sapu tangan emas supaya kembali bersih seperti saat-saat sebelumnya. Bukan sebatas kepada rakyatnya, kepada musuh pun, jika memang sudah takluk dan menyerah, raja harus memberinya ampun. Ini merupakan bagian dari sifat bijaksana seorang raja.

(7) *Kutuk* atau kotak yang berisikan emas intan berlian. Hal ini mencerminkan makna bahwa raja dan kerajaan akan bersinar dan memancarkan kekayaan yang menyebabkan adanya kewibawaan, khususnya pada kerajaan dan raja yang lain. Jika raja dan kerajaan terkesan miskin, sudah tentu akan diremehkan oleh kelompok atau kerajaan lain. Isi kotak terhitung lengkap, misalnya berbagai macam perhiasan berupa gelang, subang, kalung, cincin, sampai bros, juga emas batangan, yang sekaligus menunjukkan kewibawaan raja dan kedermawanannya.

(8) *Kandhil* atau pelita yang mengeluarkan cahaya. Ini artinya bahwa seorang raja atau pemimpin harus mampu memerankan diri sebagai pelita atau lampu yang menerangi rakyatnya. Pemerintahan seorang raja tidak boleh menyedihkan atau menggelapkan melainkan harus mencerahkan; harus memberikan pencerahan lahir dan batin kepada seluruh rakyatnya. Kabut kegelapan dan kesedihan yang menyelimuti warga atau rakyat harus dihilangkan atau dilenyapkan oleh seorang raja melalui simbol *kandhil* ini. Tentu saja, sebuah kerajaan atau negara pasti mengalami masa-masa kelam atau krisis yang membuat kehidupan rakyat suram dan menyedihkan. Karenanya, melalui simbol *kandhil* seorang raja harus mengusir kondisi kelam yang menyelimuti rakyatnya.

(9) *Saput* berupa kotak yang berisi berbagai peralatan. Perkakas ini melambangkan bahwa raja harus selalu siap menghadapi berbagai perkara. Dengan adanya berbagai peralatan tau perkakas itu, rakyat akan merasa terlindungi karena pimpinannya selalu siap jika sewaktu-waktu negara diterpa bencana. Sudah tentu berbagai perkakas dan peralatan di dalam *saput* atau kotak tersebut tidak sebesar ukuran sesungguhnya, tapi kecil-kecil karena sebatas sebagai isyarat, simbol atau perlambang (Setiyanto, 2010: 22-25; Hatmadji, dkk., 2014: 152-154).

Angka sembilan dalam tradisi Jawa dipandang sebagai angka yang paling tinggi. Pangeran Mangkubumi selaku pendiri Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki anggapan bahwa kesempurnaan manusia terjadi dari lubang pada tubuh manusia yang berjumlah 9: 2 di telinga, 2 di mata, 2 di hidung, 1 di mulut, 1 di anus, dan 1 di kelamin. Demikian juga dalam hal tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, ini tidak lepas dari perjuangan para wali yang jumlahnya juga sembilan (Setiyanto, 2010: 21). Makna angka yang tertinggi itulah yang mengilhami jumlah

Ampilan Dalem yang disertakan dalam upacara pelantikan kenaikan takhta seorang raja. Namun pusaka-pusaka itu bukan sekadar memancarkan tuah mistisisme dan sakralitas tetapi juga merefleksikan makna riil yang harus dihayati, dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seorang raja atau pemimpin.

Ke Mana Kyai Hardawalika?

Keyakinan mistik yang termanifestasikan dalam *Ampilan Dalem* atau *Ampilan Prabu* juga menyertai Sultan Hamengku Buwana VII pada saat *miyos* dalam prosesi penobatan putra mahkota Pangeran Juminah. *Ampilan Dalem* yang disertakan dalam upacara tersebut, sebagaimana tercatat dalam *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* pupuh Dandanggula bait 5, sebagai berikut.

*Mênggêb lênggah dhampar kêncana di/ alèmèk kasur bludru gêmpang/ têpi rinda buliyune/
wuri Ampilan Prabu/ banyak dhalang lan sawunggaling/ kaku mas êlar badhak/
pangojokanipun/ kakutuk kandil plantaran/ kang angampil pra biyada manggung cèti/
anèng pêngkêran Nata//*

Artinya:

Raja duduk di dampar kencana, beralas kasur bludru halus, berhias renda pinggirnya, di belakangnya disertai ampilan upacara, yakni banyak, dalang dan sawung serta galing, kaku emas, elar badak, pangojokan (alat bersirih), kutuk dan kandil serta tongkat, yang membawanya adalah para abdi dalem biyada, manggung dan ceti yang berada di belakang Sang Raja.

Kutipan tersebut menunjukkan ada 10 *Ampilan Dalem* yang menyertai Sultan Hamengku Buwana VII. Kesepuluh *Ampilan* tersebut yaitu 1). Banyak; 2). Dalang; 3). Sawung; 4). Galing; 5). Kaku Emas; 6). Elar Badhak; 7). Pangojokan (alat bersirih); 8). Kutuk; 9). Kandil; dan 10). Tongkat. *Ampilan* tersebut dibawakan oleh abdi dalem manggung yang berbaris di belakang Raja. Namun ada yang janggal. Kyai Hardawalika tidak turut serta dalam komposisi *Ampilan* tersebut. Padahal Kyai Hardawalika merupakan simbolisasi mistis yang merujuk pada seekor naga yang menopang dan sebagai simbol kekuatan. Hal ini melambangkan kekuatan dan tanggung jawab raja dalam menangani dan menyelesaikan sebuah persoalan. Meskipun dalam tradisi Kraton Yogyakarta komposisi *Ampilan Dalem* selalu berbeda, namun dalam arsip-arsip yang ada belum pernah meninggalkan Kyai Hardawalika.

Dalam tradisi Jawa, naga adalah simbol penting yang eksis sejak era Jawa Kuno. Naga digambarkan dalam candi dan arca, serta artefak-artefak di masa Islam, seperti senjata, perhiasan badan hingga lambang candrasengkala sebagaimana pendirian Kraton Yogyakarta. Motif naga juga dipergunakan dalam lambang upacara kraton yang disebut Hardawalika. Selain itu, motif naga digunakan untuk menghias benda-benda lain seperti gamelan dan kereta. Dalam tradisi percandian, Candi Panataran misalnya, motif naga diartikan sebagai penjaga kekayaan candi, juga sebagai senjata tajam yang dapat membinasakan jiwa manusia seperti tajamnya lidah ular. Naga disimbolkan sebagai lambang dunia bawah dan pemilik kekayaan yang sewaktu-waktu dapat dimintai pertolongannya oleh manusia. Di Indonesia, raja-raja merasa mempunyai ikatan kekerabatan yang erat dengan naga. Secara mistik, mereka mendapat kekuatan dari makhluk tersebut (Satari, 1987: 291-294).

Masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII dan Hamengku Buwana VIII amat memperhatikan aspek simbolis. Misalnya dalam hal pakaian adat. Pada masa itu, pakaian adat

Kraton Yogyakarta mengalami masa kejayaannya. Hal yang mendasari pengembangan pakaian adat di lingkungan kraton kala itu adalah keleluasaan untuk mengembangkan simbolisme kraton. Hal ini seiring dengan kekuasaan politik kesultanan yang sudah sangat dibatasi oleh Belanda. Pengembangan busana adat Kraton ditetapkan dan dicatat dalam *Pranata Dalêm Bab Jênêngé Panganggo Kêprabon Ing Nagari Ngajogjakarta* yang dikeluarkan pada tahun 1927 oleh Sultan Hamengku Buwana VIII (Album Pakaian Tradisional Yogyakarta, 1993: 7). Perhatian pada aspek simbolis ini nampaknya juga ingin ditunjukkan *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* dalam hal komposisi *Ampilan Dalem*.

Rangkaian pelaksanaan seremoni atau upacara yang digelar di lingkungan Kraton Yogyakarta setelah era HB II dipengaruhi oleh hasil kontak budaya dengan kolonialisme. Hal ini ditandai antara lain dengan sebutan Kangjeng Eyang bagi gubernur jenderal, tradisi saling mengunjungi dengan jamuan makan malam dan acara pesta. Di sisi lain, ruang adat di Kraton Yogyakarta adalah ruang politik yang diperluas dari pertarungan tampilan status. Hal ini ditunjukkan dengan simbol-simbol yang melekat pada status puncak Sultan, dan ini bukan sekadar hiasan atau lambang (Pramutomo, 2020: 17-22). Kenyataan ini sekaligus dapat menunjukkan alasan di balik absennya Kyai Hardawalika kala Sultan Hamengku Buwana VII *miyos* dalam penobatan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota. Sebuah simbol yang bernuansa mistis-magis dan memiliki arti penting sebagai penopang kekuasaan raja dalam *Ampilan* Kyai Hardawalika tidak disertakan dalam upacara yang sakral. Apakah semata-mata menunjukkan bahwa raja yang sedang bertakhta sudah tidak mempunyai penopang atau kekuatan sebagai pemimpin?

Sejak awal berdiri, Kraton Yogyakarta berada di bawah penjajahan. Tahun 1755-1800 menjadi jajahan VOC. Tahun 1800-1811 menjadi jajahan Bataafsche dan Republik Kerajaan Belanda yang berada di bawah pengaruh Perancis. Tahun 1811-1816 menjadi jajahan Kerajaan Inggris. Tahun 1816-1942 menjadi jajahan Kerajaan Belanda, dan tahun 1942-1945 menjadi jajahan Jepang (Tjokrosiswojo, 1956: 54). Selama itu pula eksistensi kraton banyak diintervensi oleh kepentingan asing dalam bentuk kontrak-kontrak politik. Selama itu pula, boleh dibilang, meskipun raja sebagai penguasa tertinggi di Kraton Yogyakarta, namun tidak sepenuhnya berkuasa. Kekuasaannya di banyak hal berdasarkan atau dibatasi dengan adanya kontrak politik yang telah ditandatangani ketika suksesi berlangsung.

Selama 2,5 abad sejak Kraton Yogyakarta berdiri, telah terjadi 10 kali suksesi. Selama itu pula, selalu ada entitas politik yang berkepentingan dalam suksesi. Kekuatan politik yang berasal dari luar, baik dari VOC, Inggris, Belanda maupun Jepang selalu memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses suksesi. Kehadiran mereka turut mengintervensi dan selalu ingin dominan melalui kontrak-kontrak politik yang disodorkan kepada calon penerus takhta. Dengan kata lain, harus ada restu dari mereka sebelum raja atau calon pengganti raja ditentukan. Hal ini dapat dipahami karena Yogyakarta di masa kolonial adalah vasal dari pemerintah penjajah (Harjono, 2010: 123).

Intervensi kolonial terhadap kekuasaan raja Jawa semakin meningkat, persisnya setelah tahun 1830. Kala itu, setelah Perang Diponegoro berakhir, dibentuklah Komisi Vorstenlanden pada 26 Maret dan 22 Juni 1831 yang tugasnya antara lain menganeksasi wilayah kerajaan-kerajaan Jawa. Intervensi tersebut dipicu oleh semakin banyaknya investasi modal di bidang agraria oleh pengusaha Eropa. Hal ini dilakukan melalui kontrak sewa tanah perkebunan dari para bangsawan Jawa, seiring dengan kedatangan orang-orang Eropa dan orang asing lainnya yang bermukim di wilayah Vorstenlanden. Mereka tinggal dan mempunyai kepentingan ekonomi

di wilayah tersebut (Sesana, 2010: 43; Houben, 1994: 49-54). Selanjutnya, pada 1854 Belanda menyusun sebuah undang-undang pemerintahan yang baru (*Regeeringsreglement*). Undang-undang ini merupakan revisi atas surat perintah kerja dari gubernur jenderal yang sudah berlaku sejak 1836. Meskipun salah satu pasal undang-undang tersebut berisi instruksi kepada raja agar memerintah dengan adil dan melindungi pertanian, kerajinan, perdagangan dan perkapalan, namun itu semua harus berada di bawah pengawasan Belanda. Bahkan, bila perlu Belanda ikut turun tangan (Houben, 1994: 282-283; Kiers, 1983: 85-93, 210-212).

Keinginan Belanda untuk semakin memberikan pengaruh di Kraton Yogyakarta mendapat momentumnya ketika menjelang pergantian calon pewaris takhta Sultan Hamengku Buwana VI. Persoalan yang dihadapi Sultan Hamengku Buwana VI adalah ia tidak memiliki keturunan dari permaisuri. Putra mahkota akhirnya dipilih dari putra sulung dari selir, yaitu Pangeran Hangabehi. Pilihan ini pun disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Residen Bosch. Meskipun telah disetujui, beberapa kerabat istana menyatakan keberatannya. Kangjeng Ratu Kedaton, mantan permaisuri Sultan Hamengku Buwana V mengusulkan putranya, Raden Mas Mohammad alias Pangeran Suryaningalogo menjadi putra mahkota. Di samping itu, persoalan keamanan menjadi sorotan. Sultan Hamengku Buwana VI dinilai kurang mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Persoalan-persoalan tersebut menjadi celah bagi pemerintah kolonial untuk mendesak Sultan Hamengku Buwana VI agar mengambil tindakan tegas, antara lain dengan melakukan pembaharuan dalam sistem hukum dan peradilan (Sesana, 2010: 43).

Meskipun awalnya belum berhasil, pemerintah kolonial menemukan momentumnya kembali ketika Sultan Hamengku Buwana VI wafat pada 20 Juli 1877. Takhta yang kosong itu dimanfaatkan oleh Residen A.J.B Wattendorf untuk menekan putra mahkota. Pangeran Hangabehi didesak agar bersedia membahas rencana pembaharuan hukum yang pernah disinggung sebelumnya. Tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Hangabehi kecuali harus menerima pembicaraan tersebut. Tetapi, Pangeran Hangabehi tetap berpegang teguh pada prinsip ayahandanya bahwa wewenang raja harus tetap ditegakkan. Sebagai jalan tengah, pihak kolonial dan Pangeran Hangabehi membuat kesepakatan. Perihal pembaharuan yang diajukan kolonial akan ditandatangani oleh Pangeran Hangabehi setelah ia dikukuhkan secara resmi sebagai calon pewaris takhta dengan gelar *Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram ing Ngayogyakarta Adiningrat* (Sesana, 2010: 43-45).

Kontrak-kontrak politik yang ditandatangani oleh calon penerus takhta berisi keinginan pemerintah kolonial perihal adanya asisten residen yang khusus ditugaskan sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan bagi kawula pemerintah; terkait dengan perawatan infrastruktur yang ada di wilayah kraton menjadi tanggung jawab pihak Kesultanan Yogyakarta dan bekerja sama dengan pihak lain; pihak Kesultanan Yogyakarta mendorong kerja wajib penduduk di tanah-tanah yang disewakan kepada orang Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka oleh para pemilik tanah, sengketa yang muncul akan sepenuhnya diserahkan pada keputusan pemerintah (Fillet, 1895: 308). Setelah dinobatkan sebagai putra mahkota pada 7 Agustus 1877, pada hari yang sama Pangeran Hangabehi dinobatkan sebagai raja. Setelah menduduki takhta, sebagai Sultan Hamengku Buwana VII, dirinya juga harus menandatangani kontrak lain yakni *Akte van Verband*. Kontrak ini berisi pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial dan keterikatan Kesultanan Yogyakarta terhadapnya (Sesana, 2010: 45-48).

Kontrak politik yang berisi kepentingan kolonial juga disodorkan kepada Pangeran Juminah usai dinobatkan sebagai putra mahkota. Penentuan Pangeran Juminah sebagai putra

mahkota juga harus terlebih dahulu direstui oleh Residen Yogyakarta dan Ratu Wilhelmina sebagai penguasa tertinggi negeri Hindia Belanda. Informasi ini terdapat dalam bait awal *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*, sebagaimana kutipan berikut.

Manising kang kinarya mêngêti/ tatkala karsa Dalêm Nata/ ingkang Sinuhun Sultane/ kang jumênêng ping pitu/ angrênggani Jogjakarta di/ arsa anjunjung putra/ dadya Raja sunu/ ing rèh kang raka mardika/ kang wus piningan asma Kanjêng Gusti/ Adipati Juminah//

*Karsa Dalêm Kanjêng Sri Bupati/ sabiyantu lawan Kangjêng tuwan/ So Em Keting Olipire/ Risdèn Yogyakarta gung/ **sarta sampun dipun idèni/ Kangjêng Bagenda Radja/ putri ajujuluk/ Sri Kuningin Wilhèlminah/ ingkang ngasta pusaranirèng nêgari/ ing India Nèderlan//***

Artinya:

Sungguh indah ketika mengingat, ketika Sinuhun Sultan, yang berkuasa ketujuh, bertakhta di Yogyakarta, berkenan mengangkat putranya, menjadi putra mahkota, menggantikan kakandanya, dan telah diberi nama Kanjeng Gusti Adipati Juminah.

Kehendak Raja, disetujui oleh Kanjeng Tuan CM Ketting Oliver, Residen Yogyakarta yang agung, **serta sudah diberi izin, Kanjeng Baginda Raja, yaitu putri, Sri Koningin Wilhelminah, yang berkuasa, di Hindia Nederland.**

Ada lima pasal di dalam kontrak politik atau *Kroonprins Verklaring* yang disodorkan oleh Pemerintah Residen Yogyakarta kepada Pangeran Juminah. Kelimanya yaitu pemberian hak bangun kepada pemerintah kolonial; pengambilalihan hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan garam; pengambilalihan hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan candu di wilayah Kesultanan dengan kompensasi tahunan; ketentuan yang lebih longgar mengenai sewa-menyewa tanah bagi kepentingan perkebunan; dan kesanggupan pewaris takhta untuk tidak memungut pajak baru apabila ia memegang kekuasaan (Sesana, 2010: 86-87).

Kelima pasal tersebut akan semakin mendelegitimasi kekuasaan Kesultanan Yogyakarta di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Belanda akan semakin leluasa menggunakan tanah Kesultanan untuk kepentingannya, tanpa diberlakukan sewa. Dominasi politik kolonial terhadap kewenangan tanah Kesultanan akan membuat raja hanya menerima setoran tahunan tanpa wewenang kontrol seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, konsekuensi dari rencana pihak kolonial mendatangkan orang-orang Eropa dan orang asing lainnya, serta membuatkan mereka komplek perumahan khusus di lingkungan Kesultanan, secara tata ruang akan merusak kosmologi kekuasaan Jawa, baik secara keselarasan tata ruang maupun konsep kekuasaan mutlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja dalam regulasi tata politik dan pemerintahannya. Meskipun begitu, Pangeran Juminah tidak pernah menandatangani kontrak politik tersebut. Hingga akhirnya Belanda merekayasa untuk menurunkan secara paksa status Pangeran Juminah sebagai putra mahkota dengan alasan kesehatan jiwa pada 1902 (Harjono, 2010: 41-42; Sesana, 2010: 86-91).

Fakta historis tersebut dengan demikian menunjukkan adanya intervensi Belanda yang semakin represif dari tahun ke tahun. Di samping Belanda hendak meneguhkan *status quo* sebagai yang lebih berkuasa dibanding raja Jawa, hal tersebut sekaligus menunjukkan posisi raja Jawa sebagai pihak yang tidak berkuasa alias tidak mempunyai kekuatan untuk memerintah secara leluasa. Kekuasaan raja Jawa, dalam hal ini Sultan Hamengku Buwana VII dibatasi, bahkan

mungkin tidak berkuasa sama sekali. Pasalnya, raja sudah tidak mempunyai kedaulatan politik dan pemerintahan. Semuanya harus melalui restu Belanda, termasuk dalam menentukan calon penerus takhta. Dalam konteks inilah absennya Kyai Hardawalika menjawab kenyataan sosial-politik yang terjadi di lingkungan Kraton Yogyakarta. Sebagai raja yang taat pada alegori mistik-simbolis yang dimanifestasikan dalam *Ampilan Dalem*, naskah *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* ingin menunjukkan bahwa kedudukan Sultan Hamengku Buwana VII kala itu tidak mempunyai kekuatan penopang yang disimbolkan melalui Kyai Hardawalika.

Sultan Hamengku Buwana VII sebagai Penopang

Absennya *Ampilan Dalem* Kyai Hardawalika menimbulkan pertanyaan tersendiri. Namun, tanda kebesaran raja secara mistik direpresentasikan oleh 10 *Ampilan Dalem* yang menyertainya. 1). *Banyak* atau angsa yang berarti lambang kesucian dan kewaspadaan; 2). *Dalang* atau kijang yang berarti tindakan cepat dalam membuat keputusan; 3). *Sawung* ayam jago yang berarti lambang keberanian dan ksatria; 4). *Galing* atau burung merak yang melambangkan kewibawaan; 5). *Kacu Mas* yang berarti sapu tangan emas melambangkan raja sebagai sapu tangan yang membersihkan semua kotoran atau pemaaf; 6). *Elar Badhak*, merupakan kipas dari bulu merak yang bermakna sebagai pelindung; 7). *Pangojokan* (alat bersirih). Sirih merupakan tanaman merambat, namun bukan benalu, dan bahkan menambah keindahan pohon yang dirambati. Bentuknya yang seperti hati menunjukkan makna cinta, spiritualitas, kecerdasan dan harapan akan kesejahteraan. Ujungnya lancip namun daun ini lembut dan tidak melukai. Ia juga berkhasiat sebagai obat segala macam penyakit; 8). *Kutuk* atau kotak yang berisikan emas intan berlian yang menunjukkan kewibawaan raja dan kedermawanannya; 9). *Kandil* atau pelita yang mengeluarkan cahaya supaya pemerintahan raja menerangi lahir batin seluruh rakyatnya; dan 10). *Tongkat*, merupakan simbol bagi seorang panglima dan pemimpin agama (*Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah*).

Simbol-simbol kewibawaan *Ampilan Dalem* tersebut tetap melekat pada Sultan Hamengku Buwana VII selama bertakhta. Kewibawaan-kewibawaan itu menyertai Sultan dalam menyelesaikan setiap persoalan di lingkungan istana. Misalnya, buntut dari intrik politik di internal kraton perihal suksesi, kubu Pangeran Suryaningalogo melakukan pemberontakan pada 1883. Pemberontakan tersebut merupakan kelanjutan dari pemberontakan yang terjadi pada suksesi Sultan Hamengku Buwana VI. Pangeran Suryaningalogo adalah putra Sultan Hamengku Buwana V dengan Ratu Kedhaton. Namun karena status Pangeran Suryaningalogo sebagai putra selir yang lebih muda daripada Ratu Kencono, ibu dari Pangeran Hangabehi (kelak bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwana VII), maka dukungan politik pada gerakan tersebut melemah. Meskipun demikian, kubu Ratu Kedhaton dan Pangeran Suryaningalogo terus mempengaruhi para petinggi kraton dan pemerintah Belanda untuk mewujudkan keinginannya, hingga pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Hingga akhirnya Ratu Kedhaton berniat menjodohkan Pangeran Suryaningalogo dengan salah satu putri Sultan Hamengku Buwana VII, dengan harapan kursi pewaris takhta dapat diduduki oleh Pangeran Suryaningalogo (Sesana, 2010: 43-89).

Namun upaya tersebut tidak disetujui Sultan dan bahkan tidak didukung oleh kerabat Ratu Kedhaton sendiri. Intrik-intrik politik semacam itu dihadapi Sultan Hamengku Buwana VII dengan cerdas dan berpijak pada tradisi. Intrik-intrik politik tersebut tentunya juga dianggap merepotkan Belanda. Sehingga Belanda menyarankan Sultan Hamengku Buwana VII agar segera menentukan putra mahkota. Singkat cerita, ditunjuklah GRM. Akhadiyah sebagai putra mahkota dan dilantik pada 5 April 1883. Penunjukan ini juga disetujui oleh Belanda. Hal ini sekaligus dapat

menumpas intrik-intrik politik Ratu Kedhaton yang menempuh berbagai cara agar Panegran Suryaningalogo dapat merebut takhta, setidaknya terlebih dahulu menjadi putra mahkota (Sesana, 2010: 81-83).

Adanya pemberontakan tersebut juga berdampak pada geliat kebudayaan di dalam kraton. Pengembangan seni tari di Kraton Yogyakarta sebagai upaya pembangunan rohani dan pengembangan seni tradisi di lingkungan kraton terhambat. Sultan Hamengku Buwana VII lalu mengalihkan kesulitan itu dengan menciptakan sastra. Ditulislah *Sêrat Damarwulan* yang diprakarsai oleh Sultan Hamengku Buwana VII pada 1885. Naskah ini digubah dari dramatari *Langêndriyan* yang sebelumnya diciptakan oleh adik Sultan sendiri, yakni Pangeran Mangkubumi pada 1876. *Sêrat Damarwulan* ditulis pada masa awal suksesi kraton, yakni setelah pelantikan putra mahkota GRM. Akhadiyat. Ketika pesta pernikahan Pangeran Akhadiyat, *Langêndriya*, yang merupakan hipogram dari penulisan *Sêrat Damarwulan*, juga dipentaskan. Hal ini menunjukkan bahwa *Sêrat Damarwulan* sengaja dihadirkan sebagai sarana mendidik dan memberikan teladan bagi mempelai dan calon raja. *Sêrat Damarwulan* dimaksudkan memberi bekal ajaran kesetiaan bagi wanita yang akan menikah. Hal ini tercermin dalam tokoh Anjasmara yang selalu membela dan setia memperjuangkan Damarwulan dalam suka maupun duka. Perjuangan Damarwulan untuk mengalahkan Menakjingga yang penuh risiko dan cemoohan dari Layangseta dan Layangkumitir, pengikutnya, juga menunjukkan pesan perjuangan bagi calon raja yang hendak disampaikan Sultan Hamengku Buwana VII. Seorang calon raja harus berjuang dari bawah, dari perjuangan seorang perawa kuda agar memahami kenyataan dan dinamika kehidupan rakyat (Supadma, 2011: 31-32).

Setiap menyelesaikan konflik internal maupun tekanan dari Belanda, Sultan Hamengku Buwana VII selalu menunjukkan kepribadian yang kuat, kecerdasan berpikir, dan kebijaksanaannya sebagai seorang raja. Kemelut di seputar takhta putra mahkota, desakan Belanda untuk menandatangani pembaruan kontrak politik yang berkaitan dengan peradilan dan reorganisasi agraria, yang tentu saja akan merugikan Kraton, dihadapi Sultan dengan cara lembut namun tegas. Meskipun konflik dan intrik politik senantiasa meliputi suksesi takhta sehingga mengangkat putra mahkota sampai empat kali, namun hal itu justru dimanfaatkan oleh Sultan untuk mengulur waktu terhadap pembaruan kontrak yang disodorkan oleh Belanda. Sultan Hamengku Buwana VII selalu berpegang teguh pada tradisi di Kesultanan Yogyakarta dan menandatangani kontrak atas nama pribadi, sehingga Belanda tidak dapat menuntut pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut atas nama institusi kerajaan. Kala berada dalam kondisi terdesak pun, Sultan tetap mendapatkan keuntungan berupa tunjangan dari kolonial melalui kontrak politik yang telah disepakati (Sesana, 2010: 157-159).

Selanjutnya, aspek pendidikan juga menjadi perhatian Sultan. Di tengah kemelut itu, Sultan Hamengku Buwana VII mendirikan sekolah Gubernemen di Bangsal Srimanganti pada 1890. Sekolah ini secara khusus diperuntukkan bagi abdi dalem kraton yang kelak bertugas sebagai pejabat istana. Langkah ini merupakan wujud keterbukaan dan pandangan luas Sultan Hamengku Buwana VII dalam rangka menyongsong perubahan zaman. Fasilitas pendidikan memberikan bekal bagi abdi dalem istana untuk kemajuan ekonomi dan pemerintahan, serta memberikan sentuhan intelektualitas yang modern terhadap sistem intelektual yang sebelumnya masih tradisional (Mulia, 2022: 19; Nurhajarini dkk., 2017: 3). Kebijakan ini sebagai respon atas banyaknya sekolah-sekolah modern di Jawa buatan Belanda yang mulai didirikan sejak 1831 (Surjomiharjo, 2008: 67).

Dengan kata lain, di tengah represi Belanda dan kemelut takhta yang terjadi, *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* menunjukkan bahwa raja yang bertakhta masih memiliki kewibawaan sebagaimana yang tercermin dalam *Ampilan Dalem*. Kewibawaan-kewibawaan yang tercermin itu meliputi kewaspadaan, kesucian, kebijaksanaan, keberanian, pemaaf, mengayomi, dermawan, serta memiliki status sosial dan spiritual tertinggi di Kraton sebagai panglima perang maupun pemimpin agama. Legitimasi mistik itu melekat di dalam diri sang raja ketika *miyos* pada penobatan putra mahkota Pangeran Juminah. Kewibawaan tersebut tercermin pada sikap dan pilihan politik Sultan Hamengku Buwana VII ketika menghadapi berbagai persoalan internal kraton dan tekanan-tekanan dari Belanda. Boleh dibilang, meskipun *Ampilan Dalem* Kyai Hardawalika sebagai simbol penopang tegaknya eksistensi kraton absen, pada akhirnya Sultan sendiri lah yang berperan sebagai penopang tersebut. Sultan Hamengku Buwana VII selalu pasang badan dengan segala strateginya untuk menegakkan kewibawaan keraton.

KESIMPULAN

Mistisisme Jawa Mataram merupakan hasil dari akumulasi berbagai kepercayaan yang pernah ada di bumi Jawa. Keberadaan mistisisme Jawa Mataram secara ontologis berakar pada adanya keyakinan akan Yang Maha Tak Terbatas dan Maha Kuasa yang oleh masyarakat Jawa disebut *Tan kênå kinaya ngapa* (secara transenden) dan *Sing Momong* (secara imanen). Kekuatan mistik ini diyakini oleh masyarakat Jawa, terutama kalangan Kraton Mataram, agar mampu mengatur dan mengkondisikan kehidupan manusia di alam material. Karenanya, masyarakat Jawa umumnya dan kalangan Kraton Mataram khususnya selalu menciptakan upacara-upacara yang bernuansa mistik-simbolik untuk berkomunikasi dengan realitas supranatural tersebut. Ha ini bertujuan untuk meminta pertolongan agar dimudahkan urusannya di dunia material ini. Dengan kesadaran mistis ini pula, masyarakat Jawa meyakini benda-benda tertentu memiliki roh sehingga mereka cenderung mengkeramatkan atau mensakralkannya.

Di antara serangkaian pusaka yang diyakini memiliki unsur mistik sehingga dikeramatkan adalah *Ampilan Dalem Kangjeng Kyai Upacara* Kraton Yogyakarta. Pusaka-pusaka ini biasa digunakan dalam upacara penobatan atau *jumenengan* seorang raja atau putra mahkota. *Ampilan Dalem* umumnya terdiri dari *Banyak, Dalang, Sawung, Galing, Hardawalika, Kacu Mas, Kutuk, Kandhil dan Saput*. Masing-masing pusaka ini memiliki makna yang terkait dengan tugas, kewajiban dan karakter seorang raja atau pemimpin. Di setiap gelaran upacara, *Ampilan Dalem* harus dikeluarkan untuk menyertai kehadiran sang raja (*miyos*).

Ketika Sultan Hamengku Buwana VII menobatkan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota, *Ampilan Dalem* Kyai Hardawalika tidak turut serta. Ini merupakan sesuatu yang ganjil, sebab *Ampilan* tersebut lazimnya menyertai Sultan dalam upacara yang sakral itu sebagai simbol kekuatan penopang. Absennya Kyai Hardawalika dalam upacara tersebut boleh jadi merupakan sebuah pengakuan secara mistik-simbolis oleh seorang raja yang amat taat dan teguh memegang tradisi, yakni Sultan Hamengku Buwana VII terhadap kondisi sosial-politik yang sedang terjadi. Absennya Kyai Hardawalika menunjukkan bahwa raja yang bertakhta saat itu sudah tidak mempunyai kekuatan sebagai penopang jalannya takhta. Pasalnya, Kesultanan Yogyakarta berdiri di atas kontrak-kontrak politik kolonial yang merugikan kerajaan dan orang Jawa pada umumnya.

Akan tetapi, *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* menggambarkan Sultan Hamengku Buwana VII sebagai raja yang masih memiliki kewibawaan mistis sebagaimana yang tercermin dalam 10 *Ampilan Dalem* yang menyertainya. Kewibawaan-kewibawaan tersebut meliputi kewaspadaan,

kesucian, kebijaksanaan, keberanian, pemaaf, mengayomi, dermawan, serta memiliki status sosial dan spiritual tertinggi di Kraton sebagai panglima perang maupun pemimpin agama. Legitimasi mistik itu melekat di dalam diri sang raja ketika *miyos* pada penobatan putra mahkota Pangeran Juminah. Kewibawaan tersebut tercermin pada sikap dan pilihan politik Sultan Hamengku Buwana VII ketika menghadapi berbagai persoalan internal kraton dan tekanan-tekanan dari Belanda. Boleh dibilang, meskipun *Ampilan Dalem* Kyai Hardawalika sebagai simbol kekuatan penopang atas tegaknya eksistensi kraton absen, pada akhirnya Sultan sendiri lah yang berperan sebagai penopang tersebut. Sultan Hamengku Buwana VII selalu pasang badan dengan segala strateginya untuk menegakkan kewibawaan keraton.

Pranatan Yogyakarta Hadiningrat merupakan teks yang merepresentasikan masa lalu Jawa yang berkesinambungan masa kini kontemporer, sekaligus menjadi masa depan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan politik dan kebudayaan Jawa. *Ampilan Dalem* menunjukkan bahwa raja yang berkuasa setara dengan pahlawan-pahlawan masa lalu yang tak terkalahkan dan mempunyai kemampuan untuk mengatur jalannya pemerintahan. *Pranatan Yogyakarta Hadiningrat* juga menunjukkan bahwa keberanian dibentuk bukan hanya karena kekuatan, namun karena pemikiran. Tidak selamanya seseorang harus kuat terlebih dahulu untuk menghadapi ataupun mengubah sesuatu.

REKOGNISI

Artikel ini terpilih dan dipresentasikan dalam International Symposium on Javanese Culture Keraton Yogyakarta, Maret 2024. Terima kasih dihaturkan kepada Prof. George Quinn, Honorary Professor in the College of Asia and the Pasific at the Australian National University, yang telah menjadi reviewer artikel ini pada simposium tersebut. Artikel selanjutnya disesuaikan dan dilakukan perubahan pada beberapa bagian untuk keperluan publikasi dalam Jurnal Arnawa.

DAFTAR PUSTAKA

Manuskrip

- Babad Pakualaman*, Leiden University Libraries (D Or. 15), 1800. (Diakses dari Yayasan Sastra Lestari/ sastra.org).
- Layang Bauwarna Jilid I*, Padmasusastra. 1898. (diakses dari Yayasan Sastra Lestari/ sastra.org).
- Panji Jayakusuma*, Staatsbibliothek zu Berlin (Ms. or. quart. 2112), abad ke-19. (diakses dari Yayasan Sastra Lestari/ sastra.org).
- Pranatan Yogyakarta Hadiningrat*, rekaman mikrofilm Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Serat Pananggalan, Inggang Kaping 27*. 1911. Ngayogyakarta: H. Buning. (diakses dari Yayasan Sastra Lestari/ sastra.org).

Arsip

Poenika Serat Pranatan Lampah-Lampah Djoemenengaken Goesti Raden Mas Dorodjatoen Djoemeneng Kangdjeng Goesti Pangeran Hadipati Hanom Hamangkoe Negoro, Soedibjo Rodjo Poetro Narendro Mataram, soho ladjeng kadjoemenengaken Noto, djoedjoeloek Sampejan-Dalem Inggeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Hamangkoe Boewono, Senopati ing Ngalogo Ngabdoerrahman Sajidin Panotogomo, Kalifatullah inggang Djoemeneng Kaping IX ing Negari Ngajoejokarto Hadiningrat. Senen Pon, tanggal kaping 8 woelan Sapar taohen Dal ongko 1871, oetawi kaping 18 woelan Maart taohen ongko 1940. *Pranatan Lampah-Lampah Jumenengipun Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkubumi Sarjana Hukum*, 1989. Koleksi Perpustakaan Widyabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pranatan Lampah-Lampah Jumenengipun Kangjeng Gusti Pangeran Hanom Haji Mangkubumi Sarjana Hukum Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Mataram Lajeng Jumeneng Noto Hajejuluk Ngarso-Dalem Sampeyan-Dalem Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrakhman Sayidin Panoto Gomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayogyakarta Haidningrat. Selasa Wage Tanggal Kaping 29 Rejeb Wawu 1921 utawi Suryo Kaping 7 Maret 1989. Koleksi Perpustakaan Widyabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pranatan Lampah-Lampah Karsa Dalem Kagungan Damel Mantu, 1847 AD/ 1917 M. Yogyakarta: H. Buning.

Buku

- Anonim. (1993). *Album Pakaian Tradisional Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Filet, P. W. (1895). *De Verhouding der vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Harjono, Susilo. (2012). *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Hatmadji, Tri dkk. (2014). *Mosaic of Cultural Heritage Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad. (2006). *Alam Pemikiran Yunani*. Jakarta: UI-Press.
- Houben, Vincent J. (1994). *Kraton and Kompeni*. Leiden: KITLV Press.
- Masroer. (2004). *The History of Java: Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Jogjakarta.
- Noegraha, Nindya. (1998). *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* (Tim Behrend, ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhajarini, Dwi Ratna dkk. (2017). *Meneguhkan Identitas Budaya: Sejarah Pendidikan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1939). *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen.
- Pollock, Sheldon. (2014a). *Philology in Three Dimensions*. Macmillan Publishers Ltd., 398-413.
- Pollock, Sheldon. (2014b). What Was Philology in Sanskrit? (S. Pollock, ed.). *World Philology*, Cambridge: Harvard University Press, 114-136.
- Ricklefs, M.C. (2013). *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, (Terj.), FX. Dono Sunardi & satrio Wahono. Jakarta: Serambi.
- Satari, Soejatmi. (1987). Seni Hias Ragam dan Fungsinya: Pembahasan Singkat tentang Seni Hias dan Hiasan Kuno. *Estetika dalam Arkeologi Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 288-295.
- Setiyanto, Edi. (2010). *Pendeskripsian Benda dalam Bahasa Jawa: Pendekatan Struktur . Kewacanaan*. Yogyakarta: Penerbit Balai Bahasa Yogyakarta.
- Simuh. (1995). *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Soetarso, Ki Slamet. (1967). *Pedhalangan Jangkep Lampahan Purbaningrat Tjetakan ka II*. Sala: Keluarga Soebarno.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. (2008). *Kota Yogyakarta Tempo Doele: Sejarah Sosial 1880-1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suwondo, Bambang dkk. (1977). *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976/1977.
- Tjokrosiswojo. (1956). Sekedar Gambaran Mengenai Pengadilan di Jogjakarta. *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. Yogyakarta: Panitia-Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, 54-107.
- Widyatamanta, Siman. 1996. Suara Ilahi dalam Budaya dan Agama Jawa *Penuntun III*.
- Zoetmulder, P.J. (1983). *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.

Artikel Jurnal

- Carus, Paul. (1908). *Mysticism. The Monist*, 18(1), 75-110. <https://doi.org/10.5840/monist190818134>
- Moens, Ir. J.L., Pigeaud, Dr. Th. G. Th. (1931). Verslag overde aankopen van Javaansche Handschriften. *Tijdschrift voor Indische Taal, Land-En Volkenkunde Deel LXXI*. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen, 315-348.
- Suyanto, Isbodroini. (2005). Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta dan Yogyakarta. *Antropologi Indonesia*, 29(2), 207-218.
- Pollock, Sheldon. 2015. Liberating Philology. *Verge: Studies in Global Asia Studies in Global Asia*, 1(1) 16-21. <https://doi.org/10.5749/vergstudglobasia.1.1.0016>
- Pramutomo, R.M. (2020). Royal Attire, Ceremonialism, and Performing Arts in the Kraton of Yogyakarta. *International Journal of Culture and History*, 7(1), 16-29. DOI: <https://doi.org/10.5296/ijch.v7i1.16557>
- Supadma. (2011). Langendriya dan Serat Damarwulan: Suatu Kajian Pendekatan Intertekstual. *MUDRA*, 26(1), 25-35. DOI: <https://doi.org/10.31091/mudra.v26i1.1586>

Artikel Prosiding

- Apriyadi, Clara Shinta Anindita & Buduroh, Mamlahatun. (2022, Maret). *Tradisi Penyambutan dan Penghormatan Tamu di Keraton Yogyakarta sebagai Bentuk Pola Relasi pada Masa . Pemerintahan Hamengku Buwana VII dalam Naskah Koepija Djendralan* [paper presentasi] dalam Santoso, Revianto Budi (Eds.) *Proceeding International Simposium of Javanese Studies* (Yogyakarta), (hlm. 54-69).
- Rahmawati, Salfia. (2019, 5-6 Maret). *The Collectie: Dialektika Produksi Naskah dan Budaya Rural Yogyakarta Awal Abad ke-20*. [Paper Presentasi]. International Symposium on Javanese Studies and Manuscripts of Keraton Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/332977364_The_Collectie_Moens_Dialektika_Produksi_Naskah_dan_Budaya_Rural_Yogyakarta_Awal_Abad_ke-20

Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

- Kiers, J. (1983). *Bevelen des konings; De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard* [Ph.D Thesis, University of Utrecht]. Utrecht: Oosthoek. <https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-324077&metadata=1&lan=en#page//16/03/81/160381754136497845399812287808698887509.jpg/mode/1up>
- Mulia, Mouna Pratika. (2022). *Modernisasi Birokrasi Keraton Yogyakarta: Kebijakan Sekolah Gubernemen Masa Sultan Hemengku Buwana VII (1890-1921)* [Tugas Akhir Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20529111&lokasi=lokal>
- Sesana, Riya. (2010). *Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877-1921* [Master's Tesis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=131481>
- Siregar, Jenny Sista. (2002). *Upacara Adat Perkawinan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Perkembangan dari Upacara Ritual Kenegaraan ke Upacara Populer*, (Master Tesis Program Paska Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=73627&lokasi=lokal>

Internet

- Merkur, Dan. (2023). *Mysticism*. Britanica. <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/mysticism>

